

Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui Sinergitas Program dan Kolaborasi Multi Stakeholder

Yuliani dan Eko Budi Santoso

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

e-mail: yuliani.mahardika@gmail.com

Abstrak—Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang dihadapi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Presentase kemiskinan di Kabupaten Tuban berada pada peringkat lima tertinggi di Jawa Timur sebesar 14,91% atau sebanyak 177.250 jiwa pada tahun 2023. Berbagai program penanganan kemiskinan telah diupayakan, namun masih belum optimal dan belum spesifik menyoar masyarakat miskin. Permasalahan efektivitas program dikarenakan kurangnya sinergitas dan integrasi program antarstakeholder. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi sinergitas program dan kolaborasi multi stakeholder untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Metode eksploratori digunakan dalam penelitian ini melalui analisis stakeholder, Critical Success Factor (CSF) dan Social Network Analysis (SNA). Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara kepada stakeholder terkait. Analisis stakeholder berguna untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder, yang hasilnya mengelompokkan stakeholder menjadi empat kategori, yaitu *players*, *subjects*, *context setters*, dan *crowd*. Sedangkan analisis CSF dan SNA dilakukan untuk memetakan kondisi kolaborasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Implementasi kolaborasi stakeholder dalam upaya pengentasan kemiskinan menggunakan pendekatan kolaborasi hexahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, perusahaan, organisasi non pemerintah, media, dan masyarakat. Implementasi kolaborasi program pengentasan kemiskinan berfokus pada lima faktor, yaitu penyediaan basis data terpadu kemiskinan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kantong-kantong kemiskinan, dan stabilisasi harga.

Kata Kunci— *Pengentasan Kemiskinan, Kolaborasi Stakeholder, Critical Success Factor, Social Network Analysis, Kolaborasi Hexahelix.*

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang dihadapi hampir seluruh wilayah di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu kriteria penting untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat hingga pada skala rumah tangga. Sehingga tidak jarang, masalah kemiskinan menjadi isu strategis pembangunan dari tingkat daerah hingga nasional. Di sisi lain, berhasil tidaknya program penanganan kemiskinan di suatu daerah juga bergantung pada sinergitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kolaborasi antarpemangku kepentingan memegang peranan penting dalam keberhasilan program penanganan kemiskinan karena setiap pemangku kepentingan yang terlibat memiliki peranan, pengaruh, dan kepentingan yang berbeda bergantung pada lingkungan,

posisi, dan tugas yang dimiliki.

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan secara ekonomi untuk membiayai kebutuhan dasar hidup sesuai rata-rata kebutuhan standar masyarakat di suatu wilayah [1]. Kemiskinan pada individu atau masyarakat bukan terjadi begitu saja, melainkan dipengaruhi banyak faktor. Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sikap yang menerima apa adanya, tidak memiliki kesungguhan dalam berusaha, serta didorong oleh keterbatasan fisik. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, diantaranya terkucilkan, keterbatasan akses, lapangan kerja yang minim, kesempatan terbatas, serta keterbatasan sumber daya alam [1].

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan presentase penduduk miskin yang cukup tinggi, yaitu sebesar 14,91% atau sebanyak 177.250 jiwa pada tahun 2023. Kabupaten Tuban memiliki presentase penduduk miskin tertinggi jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar dan berada pada peringkat lima tertinggi dari 38 Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Garis kemiskinan Kabupaten Tuban tahun 2023 sebesar Rp 454.336,- per kapita per bulan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Tuban tahun 2019-2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tuban lebih tinggi dari angka Jawa Timur dan kabupaten sekitarnya. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tuban juga relatif lebih tinggi dari angka Jawa Timur dan kabupaten sekitarnya.

Nilai PDRB Kabupaten Tuban atas dasar harga berlaku pada tahun 2023 mencapai 81.860.060,03 juta rupiah, hal ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Struktur perekonomian di Kabupaten Tuban didominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan (30,69%); Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (18,50%); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,12%).

Tingginya angka kemiskinan berbanding terbalik dengan jumlah industri besar di Kabupaten Tuban. Berdasarkan pengamatan di lapangan dan data Bappeda Litbang Kabupaten Tuban, hal ini disebabkan: Pertama, penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor industri masih rendah dan hanya mampu menempati posisi yang tidak strategis. Ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Tuban yang masih rendah, rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tuban Tahun 2023 masih di angka 7,4 atau lulusan SMP kelas 1. Kedua, Program CSR perusahaan belum mengarah

pada upaya penurunan kemiskinan dan masih ditujukan pada masyarakat di wilayah ring 1 perusahaan. Ketiga, kawasan industri besar yang terpusat di wilayah Utara mengakibatkan disparitas wilayah Utara dengan Selatan.

Berbagai program penanganan kemiskinan telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, namun dinilai masih belum optimal dan belum spesifik menysasar masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan kurangnya sinergitas dan integrasi program antar-Organisasi Perangkat Daerah. Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara parsial tidak akan efektif, sehingga perlu ada program yang terintegrasi antarsektoral dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Selain itu, program penanganan kemiskinan belum maksimal melibatkan lembaga masyarakat maupun pihak swasta. Padahal persoalan kemiskinan tidak akan selesai jika hanya mengandalkan program Pemerintah Kabupaten Tuban. Oleh karenanya, kolaborasi yang dibangun tidak cukup hanya kolaborasi antar-OPD, namun penting pula untuk membangun kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Tuban, perusahaan, dan masyarakat.

Kurang efektifitasnya program penanganan kemiskinan juga didasari karena data penerima program yang kurang valid. Ketersediaan data yang terverifikasi dan tervalidasi merupakan titik awal dalam melaksanakan kebijakan penanganan kemiskinan [2]. Ketersediaan data yang valid dan terkini sejak tahap perencanaan mutlak diperlukan agar eksekusi penanganan kemiskinan tepat sasaran dan tingkat keberhasilannya dapat diukur [3]. Adapun berhasil tidaknya pembangunan daerah seringkali diukur dengan melihat perubahan pada tingkat kemiskinan [4]. Sehingga setelah melihat kondisi kemiskinan di Kabupaten Tuban, dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi sinergitas program dan kolaborasi multi stakeholder untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi hidup dengan kekurangan seperti kekurangan harta dan benda berharga serta hidup pada lingkungan dengan keadaan yang serba kekurangan modal yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Kekurangan modal dalam hal ini seperti kekurangan biaya ilmu, pengalaman, minimnya kemampuan politik dan hukum, rendahnya akses terhadap fasilitas umum serta rendahnya kesempatan dalam berusaha dan bekerja [5]. Menurut Sumodiningrat kategori tingkat kemiskinan terbagi menjadi dua kategori, yaitu [6]:

1. Kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana pendapatan seseorang tidak dapat memenuhi bahkan kebutuhan paling dasar dalam hidupnya.
2. Kemiskinan relatif, yaitu pengukuran kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan di suatu wilayah. Kategori kemiskinan ini berhubungan dengan bagaimana pendapatan didistribusikan di antara kelas-kelas sosial.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, Pemerintah melakukan perancangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan

membaginya menjadi desil 1 sampai dengan desil 4, Desil 2 antara 11-20% terendah (hampir miskin), Desil 3 antara 21-30% terendah (hampir miskin), dan Desil 4 antara 31% - 40% terendah (rentan miskin).

B. Program Pengentasan Kemiskinan

Sejauh ini terdapat beberapa program penanganan kemiskinan dalam berbagai bidang yang telah dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari buku Program Penanggulangan Kemiskinan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (2011), diantaranya:

1. Pendidikan : BOS, BSM, PIP, KIP, Bantuan Subsidi Upah (untuk tenaga pendidik).
2. Kesehatan : Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (untuk ibu hamil dan balita)
3. Ekonomi : Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Bersama (KUBE) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
4. Bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
5. Infrastruktur, pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perdesaan.

Strategi dan program merujuk pada Keputusan Menko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai berikut:

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
2. Peningkatan pendapatan masyarakat
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait pengentasan kemiskinan telah dilakukan di Kabupaten Tuban sebagaimana berikut.

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu terkait Pententasan Kemiskinan		
Judul dan Penulis	Tujuan	Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban (Samian, Slamet Muchsin, Afiffudin, 2024) [25]	Mengevaluasi pelaksanaan PKH sebagai taktis mengentaskan strata miskin di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban.	- Pelaksanaan program masih dihadapkan pada beberapa kendala konvensional baik dari struktur pemerintahan maupun dari para penerima bantuan itu sendiri. - Pemahaman mendalam terhadap permasalahan konvensional, peningkatan koordinasi antar stakeholder, serta komunikasi yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi program bantuan KPM-PKH - Program yang diberikan pemerintah belum semuanya efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan Kecamatan Semanding.
Hasil Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbagai Program Pemerintah (Kecamatan Semanding) Dany Hayumna Tsany, 2020 [26]	Mengetahui hasil program penanggulangan kemiskinan berbagai kementerian di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2020.	- Hanya 18 dari 34 program pemerintah tahun program yang terlaksana dengan baik. - Program program yang tidak memberi dampak bagi tingkat kemiskinan dirasa kurang tepat sasaran atau program tersebut tidak memberikan kegiatan atau hasil yang langsung menuju masyarakatnya

Judul dan Penulis	Tujuan	Hasil
Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Integrasi Program Antar OPD (Eko Budi Santoso, Sutikno, Vely Kukinul Siswanto, Yuni Setyaningsih, 2022) [27]	Rekomendasi kebijakan terkait program pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tuban.	- Penanganan masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara parsial, namun butuh pendekatan terintegrasi dan adanya sinergi antar organisasi perangkat daerah(OPD) - Perlu adanya kolaborasi antar OPD terkait program-program yang dianggap dapat dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi antar OPD, tidak secara terpisah-pisah atau parsial berdasarkan ego-sektor masing-masing

Pada penelitian terdahulu berfokus pada evaluasi program pengentasan kemiskinan. Sehingga yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini akan berfokus mulai dari pemetaan kondisi kemiskinan yang selanjutnya menjadi acuan dalam merumuskan sinergitas program dan kolaborasi antar stakeholder.

D. Faktor Kunci dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Critical Success Factor (CSF) atau faktor kunci adalah sejumlah faktor-faktor utama yang dianggap sebagai hal penting untuk kesuksesan suatu program. Kemiskinan pada diri seseorang atau suatu masyarakat bukan terjadi begitu saja, melainkan karena banyak faktor yang menjadikan seseorang atau masyarakat menjadi miskin. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memutus siklus kemiskinan dan memperbaiki kondisi ekonomi. Beberapa penelitian menawarkan teori tentang metode dan strategi untuk memerangi kemiskinan. Faktor kunci kemiskinan dihasilkan dari sintesa strategi pengentasan kemiskinan dan berdasarkan faktor penyebab kemiskinan.

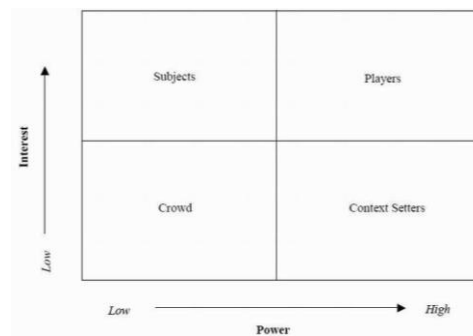
Tabel 2. Diskusi Faktor Kunci Pengentasan Kemiskinan

Penyebab kemiskinan	Faktor Kunci Pengentasan Kemiskinan
- Pertumbuhan penduduk yang tinggi [1] - Terbentuknya kelas-kelas ekonomi dalam Masyarakat [17] - Perubahan demografis [18]	Penyediaan basis data terpadu kemiskinan
- Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar [19] - Kualitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi yang rendah [17][20] - Rata – rata lama sekolah [20] - Upah Minimum Regional [20]	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat
- Kurangnya lapangan kerja, ketiadaan kesempatan [1] [18] - Kualitas angkatan kerja yang rendah, keterbatasan akses permodalan [1] [17] - Perubahan pasar tenaga kerja [18]	Peningkatan pendapatan masyarakat
- Terkucilkan, akses yang terbatas, dan keterbatasan sumber daya alam [1] [17] - Adanya disparitas karena munculnya pemusatan perkembangan di perkotaan [17] - Ketimpangan sosial [20]	Penurunan kantong-kantong kemiskinan
- Rentan Terhadap Guncangan Ekonomi - Inflasi akan meningkatkan biaya produksi yang menimbulkan kenaikan harga barang dan jasa, menyebabkan daya beli masyarakat menurun [10] [18] - Tingkat inflasi [20]	Stabilisasi Harga

E. Stakeholder dan Kelembagaan

Analisis stakeholder diawali dengan membuat daftar stakeholder dan menempatkannya pada matriks dua kali dua berdasarkan interest (kepentingan) dan power (pengaruh) stakeholder terhadap masalah [7]. Posisi koordinat dapat mewakili representasi dan peran masing-masing pemangku kepentingan. Hasil klasifikasi pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingan dikelompokkan menjadi empat kelompok.

1. Subject, adalah stakeholder yang memiliki kepentingan tinggi tetapi pengaruh yang rendah.
2. Players, merupakan stakeholder yang memiliki peran aktif pada implementasi program. Sehingga stakeholder ini memiliki kepentingan dan pengaruh besar pada kebijakan/program.
3. Context setter, adalah stakeholder yang memiliki pengaruh tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan akan tetapi sedikit kepentingan.
4. Crowd, adalah stakeholder yang memiliki kepentingan serta pengaruh yang rendah.



Gambar 1. Kuadran Stakeholder

F. Kolaborasi Stakeholder

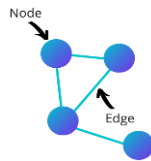
Menurut Wood & Gray (1991) dalam Fairuza (2014), kolaborasi adalah suatu proses dimana para pemangku kepentingan membaca masalah dari sudut pandang dan dimensi yang tidak sama untuk menghasilkan solusi bersama [8]. Critical success factor (CSF) atau faktor kunci kolaborasi stakeholder disintesis dari faktor kolaborasi yang paling banyak muncul pada tinjauan pustaka, yaitu:

1. Kesamaan visi, misi, tujuan dan komitmen bersama [11] [21] [22]
2. Struktur/bentuk kolaborasi dan kejelasan tata kelola [11] [22]
3. Pembagian tugas [11] [22]
4. Komunikasi dan keterbukaan [11] [22]
5. Kepercayaan (*trust*) dan saling ketergantungan (*mutualisme*) [11] [22]

Social Network Analysis (SNA) dimanfaatkan untuk mempelajari hubungan antaraktor dengan menggunakan pendekatan grafik, pendekatan ini memungkinkan SNA memberi gambaran struktur hubungan sosial dalam suatu jaringan [9]. Untuk memudahkan SNA terdapat aplikasi yang dapat digunakan, salah satunya adalah UCINET yang kemudian divisualisasikan dengan Netdraw. Terdapat beberapa parameter dalam SNA untuk mengukur sentralitas aktor dalam hubungannya pada suatu jaringan kelompok antara lain melalui *degree centrality*, *closeness centrality*, dan *betweenness centrality* [11]. Dalam analisis jaringan sosial (SNA), input data yang direpresentasikan adalah

dalam bentuk matriks. Hubungan antar aktor dalam matriks digambarkan dengan nilai 1 dan 0, angka 1 melambangkan adanya relasi sedangkan angka 0 melambangkan tidak adanya relasi di dalam jaringan. hubungan seluruh aktor dengan dirinya sendiri bernilai 0 karena memang tidak mempunyai relasi apapun dengan dirinya sendiri.

Konsep kolaborasi Hexahelix adalah pengembangan dari



Gambar 2. Aktor (Node) dan Hubungan (Edge) dalam SNA

konsep Quadruple Helix dan Pentahelix. Hexahelix menambahkan satu aktor yang memiliki peran penting dan terpengaruh atau dipengaruhi langsung pada suatu jaringan. Dalam hexahelix melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, perusahaan/swasta, media, serta aktor yang memiliki peran penting [23].

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan prosedur pemecahan masalah yang dilakukan dengan menggambarkan keadaan atau kondisi dari subyek/obyek penelitian berdasarkan fakta di lapangan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksploratori (*exploratory research*). Metode penelitian eksploratori bersifat menggali dan mendalami lebih daripada sekedar mendeskripsikan [12].

B. Variabel Penelitian

Variabel-variabel didapatkan berdasarkan hasil sintesa dari kajian pustaka. Selanjutnya dipilih variabel-variabel yang sesuai dengan obyek penelitian. Variabel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan aspek sasaran penelitian, yaitu analisis stakeholder, kondisi kolaborasi stakeholder, faktor kunci pengentasan kemiskinan, program pengentasan kemiskinan, dan strategi kolaborasi pengentasan kemiskinan.

C. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu metode penentuan jumlah sampling yang menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan [13]. Teknik ini menggunakan sampel yang memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penelitian agar hasil penelitian lebih representatif. Stakeholder dipilih sebagai sampel pada penelitian ini karena dianggap bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik terkait pengentasan kemiskinan, sehingga memiliki informasi mendalam tentang kebijakan, program, dan sumber daya yang tersedia, serta tantangan implementasi di lapangan. Adapun kriteria dimaksud adalah:

1. Mewakili Perangkat Daerah, organisasi, lembaga, atau perusahaan yang terlibat secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pengentasan kemiskinan.

2. Mewakili lembaga atau akademisi yang berperan dalam mengukur, memantau, dan memberikan masukan terhadap kondisi dan program pengentasan kemiskinan.
3. Mewakili wilayah yang mendapatkan program pengentasan kemiskinan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan pada adalah wawancara yang dilakukan untuk menggali pendapat stakeholder mengenai penanganan kemiskinan di Kabupaten Tuban selama ini, program strategis pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, serta strategi kolaborasi pengentasan kemiskinan.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan teknik pengumpulan data melalui literatur atau dokumen-dokumen dari instansi yang berkaitan.

a. Survei Instansional

Survei ini dilakukan dengan mencari data yang dibutuhkan mencakup data kemiskinan (DTKS dan P3KE) terupdate dan data realisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan tahun 2022 kepada dinas atau instansi yang bersangkutan sebagai penyedia data.

b. Survei Literatur

Survei literatur dilakukan dengan studi pustaka terkait teori dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dapat bersumber dari buku, jurnal, hasil penelitian, maupun dokumen kebijakan yang diberlakukan pada lokasi penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data ditujukan untuk menjawab tujuan dan sasaran dari penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini terbagi berdasarkan sasaran penelitian. Metode analisis yang digunakan, yaitu analisis stakeholder untuk mengidentifikasi tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder. Pemetaan kondisi kolaborasi dengan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA), yaitu metode mengukur dan memetakan sebuah hubungan serta komunikasi yang terjadi antar organisasi. Penentuan sinergitas program didasarkan Critical Success Factor (CSF), merupakan analisis yang memperhitungkan faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan dan keberhasilan suatu program. Dan pendekatan kolaborasi hexahelix, yaitu kolaborasi yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, perusahaan, organisasi non pemerintah, media, dan masyarakat.

F. Tahapan Penelitian

Berikut merupakan tahapan penelitian yang dilakukan:



Gambar 3. Tahpan Penelitian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

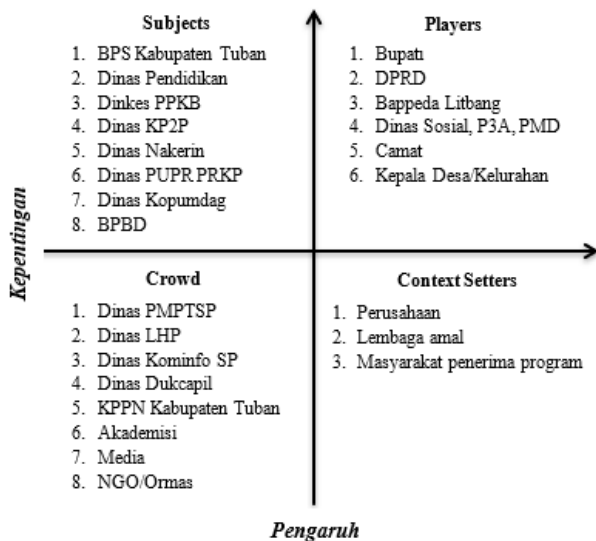
A. Identifikasi Stakeholder Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Pemetaan stakeholder dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepentingan dan pengaruh stakeholder dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Stakeholder teridentifikasi memiliki kepentingan tinggi jika stakeholder dimaksud memiliki kepentingan terhadap:

1. Pencapaian target kinerja pengentasan kemiskinan
2. Pelaksanaan program pengentasan kemiskinan
3. Penghargaan terhadap organisasi/lembaga (menyangkut nama baik)

Sedangkan stakeholder memiliki pengaruh tinggi jika stakeholder dimaksud memiliki pengaruh terhadap:

1. Penentuan kebijakan, misalnya alokasi anggaran, sasaran, dan lokus program



Gambar 4. Kuadran Stakeholder Pengentasan Kemiskinan Kab. Tuban

2. Data kemiskinan

Stakeholder yang masuk kategori *players* di Kabupaten Tuban adalah Bupati, DPRD Kabupaten Tuban, Bappeda Litbang, Dinsos, P3A, PMD, serta Camat dan Kepala Desa/Kelurahan. Bupati memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi terhadap pengentasan kemiskinan, terutama dalam penentuan kebijakan, alokasi anggaran, sasaran, dan lokus program. DPRD Kabupaten Tuban juga memiliki pengaruh yang tinggi terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan. Mereka terlibat dalam penetapan Perda APBD yang berisi program pengentasan kemiskinan dan melakukan monitoring di lapangan terhadap pelaksanaan program tersebut. Bappeda Litbang memiliki pengaruh yang cukup tinggi dalam perencanaan dan penentuan kebijakan pengentasan kemiskinan. Mereka terlibat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJPD, RPJMD, RAD, dan RKPd. Baik Bupati, DPRD, dan Bappeda Litbang memiliki kepentingan yang tinggi terhadap pencapaian penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban. Dinas Sosial, P3A, PMD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Mereka terkait langsung dengan data kemiskinan, verifikasi, dan validasi data tersebut. Mereka memiliki kepentingan yang tinggi terhadap keberhasilan program pengentasan kemiskinan dan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban. Camat dan Kepala Desa/Kelurahan juga memiliki pengaruh yang tinggi terhadap pengentasan kemiskinan di wilayahnya. Mereka memiliki kewenangan

besar dalam pembangunan di wilayahnya, termasuk memastikan validitas data kemiskinan warga di wilayah tersebut.

Stakeholder yang diklasifikasikan sebagai *subjects* terkait pengentasan kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban. BPS memiliki pengaruh tinggi karena melakukan survei untuk menentukan tingkat kemiskinan serta melakukan pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang menjadi database program pengentasan kemiskinan. Namun, kepentingan BPS rendah karena tidak bertanggung jawab langsung terhadap menurunnya angka kemiskinan. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinkes PPKB, dan Dinas PUPR PRKP memiliki pengaruh tinggi dalam menentukan sasaran program/pelayanan untuk warga miskin, seperti bantuan jamban sehat, program pendidikan vokasi, dan pembangunan rumah layak huni. Namun, kepentingan ketiga dinas ini rendah terhadap pengentasan kemiskinan. Dinas KP2P, Dinas Nakerin, dan Dinas Kopumdag memiliki pengaruh tinggi dalam menurunkan angka kemiskinan melalui program ekonomi. BPBD juga memiliki pengaruh terhadap angka kemiskinan melalui penanganan bencana.

Stakeholder yang diklasifikasikan *context setter* adalah Perusahaan dengan program CSR berkontribusi pada pengentasan kemiskinan di sekitar wilayah perusahaan. Perusahaan memiliki kepentingan tinggi terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah perusahaannya, namun memiliki pengaruh rendah karena mereka bukan pemegang kebijakan. Lembaga amal di Kabupaten Tuban seperti Baznas, Yayasan Nurul Hayat, Dompot Sosial Al-Uswah, Yatim Mandiri Tuban, LAZISMU, dan LAZISNU juga berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui penyaluran zakat, infaq, shodaqoh, dan donasi masyarakat. Meskipun lembaga amal memiliki kepentingan tinggi, pengaruhnya rendah dalam penentuan kebijakan. Masyarakat penerima program pengentasan kemiskinan memiliki kepentingan tinggi terhadap program yang mereka terima namun memiliki pengaruh rendah dalam kebijakan program tersebut.

Stakeholder yang diklasifikasikan *crowd* memiliki pengaruh dan kepentingan rendah dalam pengentasan kemiskinan. Ada beberapa perangkat daerah termasuk Dinas PMPTSP, Dinas LHP, Dinas Kominfo SP, dan Dinas Dukcapil yang termasuk dalam klasifikasi *crowd*. Meskipun mereka tidak memiliki pengaruh langsung terhadap program pengentasan kemiskinan, mereka membantu dalam memfasilitasi program tersebut. Misalnya, Dinas Dukcapil membantu Dinsos dan P3A dengan mencocokkan data kemiskinan dan kependudukan. KPPN Tuban, akademisi, media, NGO, dan Ormas juga diklasifikasikan sebagai stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan rendah, karena mereka memberikan saran dan rekomendasi namun tidak secara langsung terlibat dalam program pengentasan kemiskinan.

B. Pemetaan Kondisi Kolaborasi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban selama ini kurang efektif dikarenakan lemahnya kolaborasi yang ada, Sehingga untuk merumuskan strategi kolaborasi penanganan kemiskinan yang tepat, maka menjadi hal yang penting untuk mengetahui kondisi kolaborasi yang berjalan selama ini.

- 1) Kondisi Kolaborasi Stakeholder berdasarkan Faktor Kunci Kolaborasi

Kolaborasi stakeholder dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban didasarkan pada beberapa faktor kunci. Pertama, terdapat kesamaan visi, misi, tujuan, dan komitmen bersama yang tercermin dalam pembentukan peraturan daerah tentang pengentasan kemiskinan. Faktor kunci kedua adalah struktur/bentuk kolaborasi dan kejelasan tata kelola. Dalam menjalankan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tuban telah memiliki susunan tim penanggulangan kemiskinan, namun saat ini, tim koordinasi hanya didominasi oleh unsur pemerintah daerah, sehingga keterlibatan perusahaan dan masyarakat perlu ditingkatkan. Faktor kunci ketiga adalah pembagian tugas, yang saat ini belum ada pengaturan spesifik di antara anggota TKPK. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih program dan pemborosan sumber daya. Faktor kunci keempat adalah komunikasi dan keterbukaan. Komunikasi yang terjadi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban masih kurang efektif dan akses terbatas terhadap sumber data bersama dapat menghambat kolaborasi. Faktor terakhir, kepercayaan dan saling ketergantungan antar berbagai pemangku kepentingan. Faktor ini sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. TKPK Kabupaten Tuban dalam menjalankan tugasnya berupaya menerapkan kepercayaan (*trust*) dan saling ketergantungan (*mutualisme*) serta melengkapi satu sama lain. Meskipun seringkali yang muncul adalah bukan saling ketergantungan, tapi menggantungkan kepada stakeholder lain. Untuk meningkatkan kondisi kolaborasi stakeholder, perlu dilakukan peningkatan dalam semua faktor kunci ini, termasuk melibatkan semua pemangku kepentingan yang relevan dalam tim koordinasi.

2) Pemetaan Kondisi Kolaborasi Stakeholder Menggunakan *Social Network Analysis* (SNA)

Pemetaan kondisi kolaborasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban menggunakan metode SNA dengan beberapa jenis pengukuran meliputi *degree centrality*, *closeness centrality*, dan *betweenness centrality*. Dalam pemetaan kondisi kolaborasi digunakan program UCINET dan visualisasi melalui program NetDraw dengan tahapan sebagai berikut.

i. *Density*

Sebelum mencari nilai *centrality*, terlebih dahulu menentukan nilai *density* yang bermanfaat guna mendapatkan informasi tentang jumlah hubungan masing-masing aktor. Nilai *density* yang mendekati 0 menunjukkan bahwa jaringan memiliki sedikit hubungan dan sebaliknya. Kolaborasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban memiliki nilai *density* 0,2977 yang berarti hubungan kolaborasi yang terjadi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban masih rendah yaitu sebesar 30%. Selain nilai *density* dihasilkan juga nilai standar deviasi, sebesar 0,4573. Nilai standar deviasi jika lebih kecil dari 0 maka semakin baik, sehingga dapat ditarik kesimpulan tidak terdapat error pada data yang diproses.

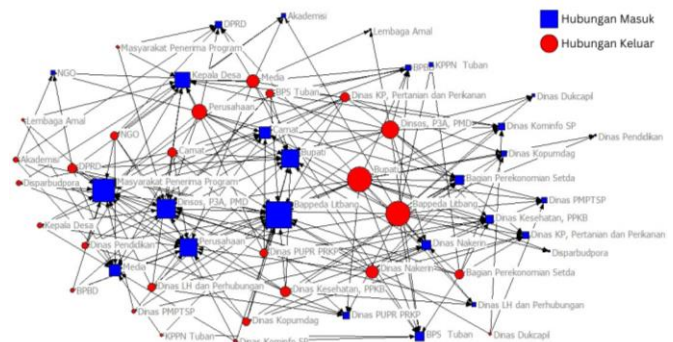
ii. *Degree Centrality*

Degree centrality menunjukkan adanya hubungan atau tingkat kohesi yang dimiliki dari setiap stakeholder dalam jaringan SNA. Hasil analisis diperoleh bahwa Bappeda Litbang berada di posisi pertama dengan nilai *outdegree* 20 dan nilai *indegree* 21, hal ini sesuai karena dalam upaya pengentasan kemiskinan Bappeda Litbang berperan

dalam pendataan, perencanaan, dan monitoring serta evaluasi. Nilai hubungan yang tinggi baik yang keluar atau masuk dikarenakan Bappeda Litbang berperan dalam mengkoordinasikan berbagai pihak untuk mendukung implementasi program pengentasan kemiskinan.

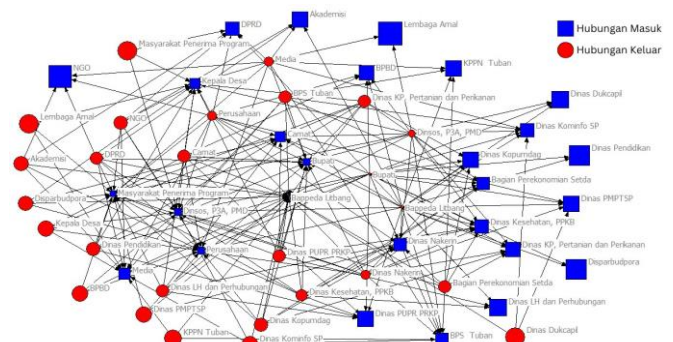
Stakeholder dengan nilai *degree centrality* paling rendah adalah Lembaga Amal dengan nilai *outdegree* 3 dan nilai *indegree* 2. Hal ini karena Lembaga Amal hanya berhubungan dengan sebagian kecil stakeholder, seperti masyarakat penerima program, media, dan Kepala Desa. Kedepannya penting untuk melibatkan Lembaga Amal secara aktif karena Lembaga Amal seringkali memberikan bantuan kepada individu atau komunitas yang membutuhkan seperti bantuan langsung, program pendidikan dan lainnya.

iii. *Closeness Centrality*



Gambar 5. Diagram *Degree Centrality* Kondisi Kolaborasi Stakeholder dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Closeness centrality dalam SNA digunakan untuk mengetahui sebaran informasi suatu jaringan atau dapat dimaknai sebagai ukuran yang menggambarkan jarak rata-rata stakeholder yang berkolaborasi dengan stakeholder lainnya. Semakin tinggi nilai yang diperoleh stakeholder maka stakeholder tersebut memiliki kedekatan dengan stakeholder lainnya. Dihasilkan stakeholder dengan nilai *closeness centrality* paling tinggi adalah Bappeda Litbang, sesuai dengan peran Bappeda Litbang sebagai pihak yang mengkoordinasikan berbagai pihak. Nilai *closeness centrality* tinggi berarti Bappeda Litbang dengan mudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan stakeholder lainnya dalam upaya kolaborasi pengentasan kemiskinan.



Gambar 6. Diagram *Closeness Centrality* Kondisi Kolaborasi Stakeholder dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Stakeholder dengan nilai *closeness centrality* paling rendah adalah Lembaga Amal. Nilai rendah ini diakibatkan dari kurangnya kedekatan Lembaga Amal dengan stakeholder lain dalam program pengentasan kemiskinan. Yang terjadi selama ini, seringkali Lembaga Amal dalam menjalankan programnya langsung

berkomunikasi dengan masyarakat penerima program tanpa berkoordinasi dengan stakeholder lain. Selanjutnya akan lebih baik jika Lembaga Amal lebih dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pengentasan kemiskinan, mengingat Lembaga Amal memiliki program sendiri dan posisi strategis dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

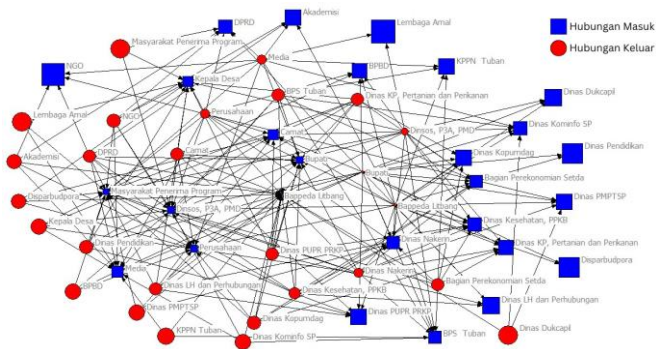
iv. *Betweenness centrality*

Betweenness centrality mengukur sejauh mana suatu node bertindak sebagai perantara (*intermediary*) dalam komunikasi atau transfer informasi antar node lain dalam jaringan. *Betweenness centrality* dapat memberikan wawasan tentang node mana yang berpotensi memiliki pengaruh besar dalam mengontrol aliran informasi dalam jaringan. Dalam analisis *Betweenness Centrality* apabila salah satu stakeholder memperoleh nilai diatas 1 menunjukkan stakeholder tersebut memiliki peran sebagai penghubung stakeholder atau fasilitator, sedangkan stakeholder yang memperoleh nilai kurang dari 1 maka menunjukkan bahwa stakeholder tersebut tidak berperan sebagai fasilitator.

Hasil analisis yang memiliki nilai tertinggi adalah Bappeda Litbang dengan nilai 176,504. Bappeda Litbang bersifat sebagai fasilitator atau perantara dalam aliran informasi terkait program pengentasan kemiskinan. Nilai yang tinggi juga berarti bahwa stakeholder tersebut memiliki pengaruh yang besar, hal ini sesuai dengan hasil analisis degree dan closeness centrality Bappeda Litbang yang bernilai tinggi.

Sedangkan stakeholder yang memiliki nilai kurang dari satu antara lain Dinas LH dan Perhubungan, Dinas Pendidikan, Disbudporapar, Dinas Dukcapil, BPBD, dan Lembaga Amal. Akan lebih baik jika dalam upaya pengentasan kemiskinan kolaborasi antar stakeholder lebih diperhatikan, sehingga dapat dihasilkan solusi yang lebih efisien dan efektif.

Berdasarkan *SNA*, dihasilkan bahwa kondisi pembagian



Gambar 7. Diagram *Betweenness Centrality* Kondisi Kolaborasi Stakeholder dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

peran dalam kolaborasi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban saat ini masih berat sebelah, dengan Bappeda Litbang sebagai stakeholder yang memiliki peran paling besar. Selain itu juga dihasilkan partisipasi organisasi atau lembaga di luar pemerintah yang masih rendah. Hal ini ditunjukkan salah satunya Lembaga Amal sebagai stakeholder dengan peran paling rendah. Pembagian peran stakeholder yang tidak merata dapat menjadi penghambat dalam kolaborasi dan mengakibatkan upaya pengentasan kemiskinan kurang efektif. Sehingga penting untuk menciptakan lingkungan di mana semua stakeholder dapat berpartisipasi secara adil dan konstruktif dalam upaya pengentasan kemiskinan.

C. *Sinergitas Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban*

Untuk menentukan sinergitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban didasarkan pada faktor kunci pengentasan kemiskinan sebagaimana hasil tinjauan tinjauan pustaka. Tujuan dari sinergitas program adalah untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat dicapai secara individual, serta memaksimalkan dampak positif terhadap masyarakat atau lingkungan.

Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban telah dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan, baik yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perusahaan, lembaga amal, NGO, maupun masyarakat. Jika direkapitulasi sinergitas program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh OPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Sinergitas Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pengentasan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah Berdasarkan Faktor Kunci

Faktor Kunci	Jumlah OPD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah sub Kegiatan
Penyediaan basis data terpadu kemiskinan	4	6	7	11
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	9	13	20	67
Peningkatan pendapatan masyarakat	5	14	21	32
Penurunan kantong-kantong kemiskinan	6	15	23	62
Stabilisasi Harga	4	5	10	31

Tabel 4. Bentuk Program Pengentasan Kemiskinan

Faktor Kunci	Bentuk Program
Penyediaan basis data terpadu kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan penduduk miskin 2. Verifikasi dan validasi data kemiskinan 3. Penyandingan data kemiskinan dengan data kependudukan 4. Penggunaan teknologi informasi untuk pengolahan data 5. Pemanfaatan data kemiskinan untuk menentukan kebijakan sasaran pengentasan kemiskinan
Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa PAUD, SD dan SMP 2. Pemberian BOP PAUD dan BOS bagi SD/SMP 3. Mengajak warga yang putus sekolah untuk kembali sekolah di PKBM melalui Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C secara gratis 4. Beasiswa bagi pemuda dan mahasiswa berprestasi, khususnya dari keluarga miskin 5. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat, mulai dari ibu hamil dan bersalin, bayi, balita, anak-anak, usia produktif, penderita penyakit menular dan tidak menular, ODGJ, penderita Napza 6. Pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat, melalui BPJS, PBI, PBID, dan BPJS Ketenagakerjaan 7. Bantuan logistik bagi korban bencana 8. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana 9. Pemberian permakanan bagi lansia 10. Pemberian sandang bagi gelandangan 11. Pemberian alat bantu bagi disabilitas 12. Penelusuran keluarga gelandangan dan terlantar 13. Penetapan UMK 14. Keanekaragaman pangan masyarakat berbasis pangan lokal 15. Penguatan gizi masyarakat melalui gerakan makan ikan (Gemar Ikan)

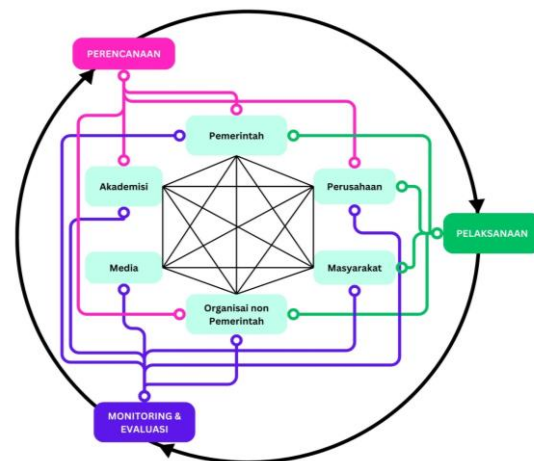
<p>Peningkatan pendapatan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja sesuai dengan kompetensinya 2. Pembinaan untuk lembaga pelatihan kerja swasta 3. Bursa kerja dan penempatan kerja 4. Pemberdayaan masyarakat (baik individu maupun keluarga) dan kelembagaan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Bumdes, karang taruna, lembaga adat, PKK 5. Peningkatan ekonomi dan taraf hidup keluarga melalui koperasi Pengembangan skala usaha UMKM melalui pengembangan produksi, pemasaran, SDM, dan teknologi 6. Pemberian sarana tangkap bagi nelayan kecil 7. Peningkatan SDM nelayan kecil dan pengembangan nelayan kecil 8. Penjaminan ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan 9. Peningkatan skill pembudidaya ikan 10. Penguatan data dan informasi pemasaran dan pengolahan hasil perikanan 11. Pemberian bantuan peralatan penyimpanan ikan (coolbox, freezer, keranjang dll) dan mesin pengolahan (mesin pembuat kerupuk, terasi dll) 12. Peningkatan skill penggunaan sarana pertanian 13. Penjaminan ketersediaan dan peredaran pakan ternak 14. Pengendalian organisme pengganggu tanaman 15. Pendampingan dan penguatan kelompok tani 16. Fasilitasi akses permodalan bagi UMKM, petani, dan nelayan 17. Bimbingan standar mutu pengolahan dan pemasaran 18. Pembinaan pelaku seni untuk meningkatkan kesejahteraannya
<p>Penurunan kantong-kantong kemiskinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan rehabilitasi prasarana, sarana, dan utilitas sekolah 2. Pendampingan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk pemberian jamban sehat bagi keluarga miskin 3. Pembangunan infrastruktur perlindungan mata air 4. Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan dan air tanah 5. Perencanaan, kebijakan, strategi, dan perluasan jaringan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) 6. Perencanaan, kebijakan, strategi, penyediaan dan optimalisasi SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) 7. Perizinan perumahan 8. Perencanaan, kerjasama, dan penyediaan PSU perumahan 9. Perizinan perumahan 10. Perencanaan, kerjasama, dan penyediaan PSU perumahan 11. Peningkatan kesadaran rumah sehat dan layak huni 12. Pendataan, verifikasi, penetapan, dan perbaikan RTLH serta kawasan kumuh 13. Inventarisasi dan fasilitasi kepemilikan tanah milik masyarakat miskin 14. Perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan jalan 15. Pembangunan, pelebaran, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan dan jembatan 16. Penyusunan dan penutakhiran peta ketahanan dan kerawanan pangan 17. Penyaluran cadangan pangan ke wilayah rawan pangan 18. Perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan lahan untuk budidaya ikan 19. Pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan embung, jalan usaha tani, jaringan irigasi, balai penyuluh pertanian dan lainnya 20. Penyediaan angkutan gratis bagi pelajar 21. Hibah angkutan penyeberangan untuk desa di sekitar Waduk Jabung dan Bengawan Solo 22. Fasilitasi Pas Kapal bagi nelayan kecil
<p>Stabilisasi Harga</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan harga minimum pangan pokok lokal. 2. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok di tingkat produsen, agen, pasar, dan konsumen. 3. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan

	<p>pokok pada pelaku usaha distribusi barang, salah satunya dapat difasilitasi melalui sistem informasi perdagangan yang terintegrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Operasi pasar dan gelar pangan murah. 5. Pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, khususnya di lumbung-lumbung pangan. 6. Pengawasan pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi.
--	--

D. Strategi Implementasi Kolaborasi Program Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

1. Strategi Implementasi Kolaborasi Stakeholder dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Strategi kolaborasi stakeholder dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Tuban menggunakan pendekatan kolaborasi hexahelix. Pada diagram di atas, terdapat berbagai stakeholder yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban, yaitu pemerintah, perusahaan, masyarakat, organisasi non pemerintah, media, dan akademisi.



Gambar 8. Diagram Strategi Implementasi Kolaborasi Stakeholder Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

identifikasi masalah, penetapan tujuan, pemilihan strategi, alokasi sumber daya, dan perumusan program. Pemerintah berperan dalam perencanaan kebijakan dan program, sementara akademisi memberikan masukan berdasarkan temuan penelitian. Perusahaan dan organisasi non pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah dan akademisi dalam perumusan program.

Tahapan pelaksanaan mencakup koordinasi, implementasi program, dan interaksi langsung dengan masyarakat penerima program. Kerjasama antara stakeholder diperlukan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan efektif. Tahapan monitoring dan evaluasi, membantu mengukur, memantau, dan mengevaluasi efektivitas program. Pemerintah, akademisi, perusahaan, organisasi non pemerintah, media, dan masyarakat terlibat dalam monitoring dan evaluasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan keberhasilan kebijakan dan program, akademisi menganalisis program, perusahaan memastikan program CSR mereka berdampak positif, organisasi non pemerintah mengevaluasi program, media menyebarkan informasi dan memberikan umpan balik, dan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi partisipatif.

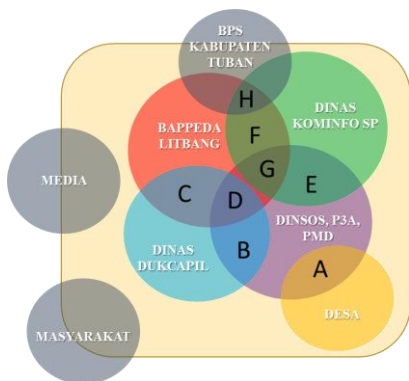
2. Strategi Implementasi Kolaborasi Program dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban

Strategi implementasi kolaborasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban berfokus pada lima faktor kunci pengentasan kemiskinan dan keterlibatan aktornya berdasarkan dengan hasil pemetaan analisis SNA.

i. Kolaborasi Penyediaan Data Kemiskinan

Sampai saat ini belum terdapat data kemiskinan terpadu yang terverifikasi dan tervalidasi dengan baik dan benar yang bisa diakses oleh seluruh stakeholder, sehingga hal ini menjadi salah satu fokus yang penting untuk diselesaikan. Strategi kolaborasi penyediaan data kemiskinan meliputi, merumuskan dan menyepakati kerangka kerja (proses bisnis) dan berbagi peran dalam penyediaan basis data terpadu kemiskinan yang memungkinkan berbagai pihak yang terlibat untuk berbagi dan menggunakan data secara bersama-sama dan membuat sistem aplikasi yang mengintegrasikan berbagai data kemiskinan serta memudahkan dalam penginputan, updating, verifikasi, validasi, pengolahan, dan penggunaan data kemiskinan terpadu dengan tetap memperhatikan standar keamanan dan privasi data.

- A: Updating dan verifikasi data kemiskinan
- B dan C: Penyandingan data kemiskinan (DTKS) dengan data kependudukan untuk mengkroscek data



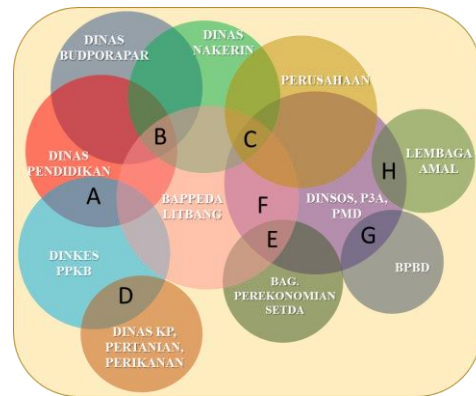
Gambar 9. Diagram Kolaborasi Program Penyediaan Basis Data Terpadu Kemiskinan

- D: Bersama-sama melakukan validasi data kemiskinan
- E dan F: Menghasilkan aplikasi yang memudahkan dalam melakukan updating dan verifikasi data kemiskinan.
- G: Bersama-sama mengelola data kemiskinan dan pemanfaatannya.
- H: Kedepan data Regsosek hasil Sensus BPS pada tahun 2022 akan dijadikan data terpadu pengentasan kemiskinan menggantikan DTKS dan P3KE
- Media dan masyarakat: Merupakan stakeholder yang dapat memberi saran masukan terkait dengan data kemiskinan

ii. Kolaborasi Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

Strategi kolaborasi program pengurangan beban pengeluaran masyarakat memprioritaskan program yang berdampak besar bagi pengurangan beban pengeluaran, diantaranya pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial.

- A: Pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) gratis bagi masyarakat miskin, mulai dari desil 1 sampai dengan desil 4.



Gambar 10. Diagram Kolaborasi Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat

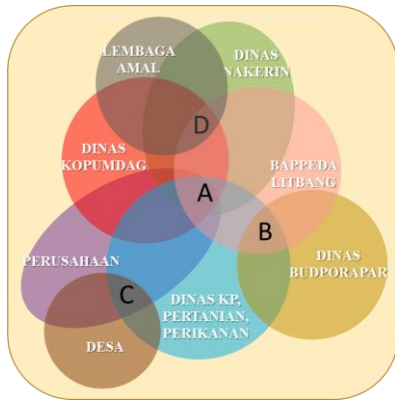
- B: Perencanaan dan penganggaran program pengurangan beban masyarakat dengan fokus pendidikan dan pelatihan, mendorong anak putus sekolah atau warga di atas usia sekolah yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun untuk kembali sekolah melalui program kejar paket A, B, ataupun C di PKBM yang terdapat di setiap kecamatan. Program ini diberikan secara gratis dan bagi yang mau mengikutinya diberi insentif pelatihan kerja, pemberian beasiswa, dan pemberian Pendidikan vokasi.
- C: pembagian wilayah kerja dan sasaran program sehingga program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran dan merumuskan UMK dengan prinsip agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.
- D: Penganekaragaman pangan masyarakat berbasis sumber daya lokal, Penguatan gizi masyarakat melalui gerakan makan ikan (Gemar Ikan), Pendampingan dan pemberian bantuan bibit sayuran dan ikan untuk dipelihara di skala keluarga. Ketiga program tersebut juga secara tidak langsung akan mengurangi potensi stunting.
- E: Perencanaan dan penentuan alokasi anggaran yang bersumber dari DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) melalui pemberian bansos dan BLT yang diprioritaskan bagi masyarakat miskin desil 1.
- F: Memastikan seluruh pemberian bansos dari berbagai sumber pendanaan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran yang memprioritaskan pada desil 1.
- G: Menerjunkan TRC (Tim Reaksi Cepat) bencana, Tagana (Taruna Siaga Bencana), dan relawan bencana setiap terjadi bencana untuk meminimalisir korban dan dampak kerugian dan menyalurkan bantuan.
- H: Berbagi peran dalam penyaluran bansos, agar bantuan yang diberikan ke masyarakat tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

iii. Kolaborasi Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Peningkatan pendapatan dapat membantu individu dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kesejahteraan, dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat dapat dilakukan dengan strategi kolaborasi program:

- a. Memprioritaskan program yang berdampak besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat, diantaranya pemberdayaan SDM, bantuan penunjang usaha, serta fasilitasi akses permodalan dan pemasaran bagi UMKM.
- b. Sasaran penerima program diprioritaskan bagi masyarakat miskin Desil 3-4.
 - A:
 - Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat dengan

mengkolaborasikan dan mengoptimalkan dana APBD dan CSR serta melalui pendekatan hulu hilir dan nilai



Gambar 11. Diagram Kolaborasi Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat

tambah sektor primer (pertanian dan perikanan).

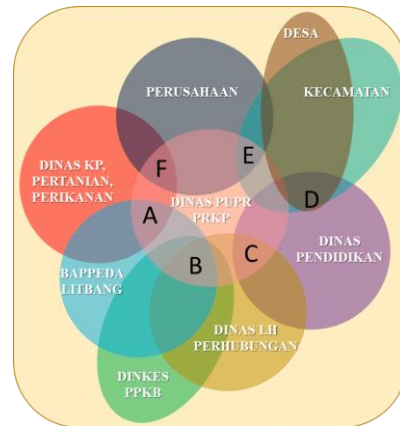
- Penerapan sistem resi gudang untuk hasil produksi pertanian guna memutus rantai tengkulak
- Perbaiki distribusi pupuk bersubsidi dan memastikan seluruh petani kecil mudah mengaksesnya.
- Pemberian pelatihan dan bantuan sarana prasarana pengolahan produk pertanian dan perikanan bagi UMKM dan buruh tani
- Fasilitasi investasi pada pengembangan sektor primer dan UMKM/IKM
- Pelatihan dan fasilitasi pemasaran produk UMKM dan IKM
- Peningkatan lapangan kerja
- B: Perencanaan dan penganggaran program peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengkolaborasikan sektor primer dan pariwisata, peningkatan nilai tambah sektor primer (pertanian dan perikanan) menjadi destinasi pariwisata, pengintegrasian antardestinas wisata, dan fasilitasi pertemuan antara pengelola wisata desa dengan agen travel
- C: Perusahaan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat berbasis sektor usaha yang mayoritas digeluti masyarakat dan pengelolaan sabuk hijau perusahaan-perusahaan besar untuk kegiatan pertanian,
- D: Pelibatan Lembaga Amal dalam perencanaan dan penganggaran program peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengkolaborasikan pendanaan bersumber dari APBD dan Lembaga Amal, hal ini sesuai dengan hasil analisis SNA yang menunjukkan Lembaga amal belum dilibatkan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

iv. Kolaborasi Program Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan

Upaya penurunan kantong-kantong kemiskinan akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan strategi kolaborasi program yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Memfokuskan sasaran program pada daerah pinggiran, terpencil, dan kumuh.
 - b. Memprioritaskan perbaikan dan peningkatan akses infrastruktur meliputi pendidikan, kesehatan, jaringan transportasi, listrik, air bersih, dan sanitasi.
 - c. Meningkatkan kelayakan rumah tinggal dengan prioritas masyarakat miskin pada desil 1.
- A: Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan melalui penguatan infrastruktur konektivitas

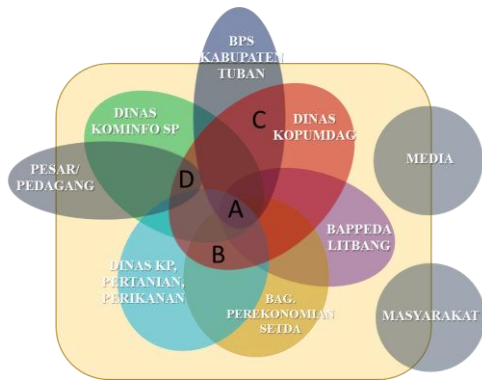
antarwilayah dan penguatan konektivitas wilayah penghasil sektor primer dengan pasar dan pusat kegiatan ekonomi lainnya. Kedua poin di atas selain bertujuan untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan, juga akan berdampak pada berkurangnya ketimpangan wilayah Utara



Gambar 12. Diagram Kolaborasi Program Penurunan Kantong-Kantong Kemiskinan

dan Selatan Tuban.

- B: Perencanaan dan penganggaran pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas sanitasi masyarakat dan pemenuhan SPM sanitasi, meliputi akses air bersih, akses jamban sehat, dan pengelolaan sampah
 - C: Penguatan konektivitas antarwilayah serta pusat-pusat ekonomi/fasum/ fasos dan angkutan gratis bagi pelajar, khususnya menjangkau wilayah terpencil ataupun yang tidak tersedia angkutan umum.
 - D: Mendorong kantong-kantong kemiskinan yang tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah atau terdapat anak putus sekolah untuk kembali sekolah melalui lembaga pendidikan formal ataupun informal, seperti misalnya PKBM, pengalokasian beasiswa bagi pelajar berprestasi namun berasal dari keluarga miskin, dan memperbanyak dan memperluas pendidikan vokasi untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat Tuban.
 - E: *Refocusing* program CSR untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan yang memfokuskan sasaran pada desa-desa miskin dengan melibatkan pihak kecamatan dan desa.
 - F: Hilirisasi sektor primer (pertanian, peternakan, dan perikanan), salah satunya dengan menumbuhkan agroindustri dan percepatan perwujudan agropolitan dan minapolitan berbasis komoditas unggulan Tuban.
- v. Kolaborasi Program Stabilisasi Harga
- Strategi kolaborasi program stabilisasi harga yang dapat dilakukan, meliputi:
- a. Memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok dan kebutuhan dasar di pasar.
 - b. Memastikan kelancaran distribusi bahan pokok dan kebutuhan dasar.
 - c. Memastikan keterjangkauan harga bahan pokok dan kebutuhan dasar bagi masyarakat
- A: Melakukan koordinasi rutin yang terhimpun dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Tuban, merumuskan strategi menekan inflasi di Kabupaten Tuban, dan menentukan harga minimum pangan lokal.
 - B: Menjaga stabilitas harga, khususnya harga sembako melalui operasi pasar maupun gelar pangan murah,



Gambar 13. Diagram Kolaborasi Program Stabilisasi Harga

memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok salah satunya dengan memutus rantai tengkulak dengan menerapkan sistem resi gudang bagi para petani, menyediakan cadangan pangan di lumbung-lumbung pangan untuk mengantisipasi masa paceklik atau harga pangan diluar kendali, dan memastikan subsidi pupuk tepat sasaran.

- C: Memantau perkembangan harga kebutuhan pokok secara harian
- D: Menyediakan sistem informasi perdagangan untuk memudahkan produsen, konsumen, pedagang, maupun pemerintah kabupaten untuk memantau perkembangan harga bahan pokok secara harian.
- Media dan Masyarakat: Merupakan stakeholder yang dapat memberi informasi terkait dengan perkembangan dan fluktuasi harga bahan pokok di pasaran maupun adanya pedagang yang nakal (memainkan harga, kualitas maupun berat). Informasi tersebut juga akan bermanfaat bagi pengambil kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi sinergitas program dan kolaborasi multi stakeholder untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan pemetaan kondisi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban dan memberikan strategi sinergitas program dan kolaborasi multi stakeholder melalui berbagai analisis sebagai berikut.

Tahapan analisis penelitian yang pertama adalah analisis stakeholder yang menunjukkan bahwa stakeholder pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban, dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Kategori *Players* meliputi Bupati, DPRD, Bappeda Litbang, Dinas Sosial, P3A, PMD, Camat, dan Kepala Desa/Kelurahan. *Subjects* meliputi BPS, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas PUPR PRKP, Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan, dan BPBD. *Context setters* meliputi perusahaan, lembaga amal, dan masyarakat penerima program. Sedangkan *crowd* meliputi Dinas PMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Kominfo SP, Dinas Dukcapil, KPPN Kabupaten Tuban, Akademisi, Media, dan NGO/Ormas.

Kedua pemetaan kondisi kolaborasi stakeholder dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban ditinjau berdasarkan lima faktor kunci kolaborasi stakeholder dan SNA. Faktor kunci kolaborasi meliputi kesamaan visi, misi,

tujuan dan komitmen bersama; struktur/bentuk kolaborasi dan kejelasan tata kelola; pembagian tugas; komunikasi dan keterbukaan; serta kepercayaan dan saling ketergantungan. Berdasarkan tinjauan pada kelima faktor tersebut dan hasil SNA menunjukkan bahwa pembagian peran dalam kolaborasi masih berat sebelah dan partisipasi organisasi di luar pemerintah rendah.

Ketiga, sinergitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban dikelompokkan menjadi lima berdasarkan dengan faktor kunci pengentasan kemiskinan, yaitu Pertama, penyediaan basis data terpadu kemiskinan yang melibatkan 4 OPD dan terdiri dari 6 program, 7 kegiatan, dan 11 sub kegiatan. Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat yang melibatkan 7 OPD dan terdiri dari 11 program, 15 kegiatan, dan 56 sub kegiatan. Ketiga, peningkatan pendapatan masyarakat yang melibatkan 5 OPD dan terdiri dari 14 program, 21 kegiatan, dan 32 sub kegiatan. Keempat, penurunan kantong-kantong kemiskinan yang melibatkan 6 OPD dan terdiri dari 15 program, 23 kegiatan, dan 63 sub kegiatan. Kelima, stabilisasi harga yang melibatkan 4 OPD dan terdiri dari 5 program, 10 kegiatan, dan 31 sub kegiatan.

Keempat, strategi implementasi kolaborasi dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi menggunakan pendekatan kolaborasi hexahelix yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, perusahaan, organisasi non pemerintah, media, dan masyarakat. Kolaborasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban berfokus pada lima faktor kunci pengentasan kemiskinan dan keterlibatan aktornya berdasarkan dengan hasil pemetaan analisis SNA.

Saran dari penelitian ini adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Tuban memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban dengan berbagai tugas seperti perencanaan, koordinasi dan sinkronisasi, serta monitoring dan evaluasi. Namun struktur TKPK masih didominasi oleh unsur pemerintah, sehingga untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya penanggulangan kemiskinan struktur TKPK perlu diperbaiki dan diperkuat yang melibatkan seluruh unsur stakeholder yang terpetakan berdasarkan pendekatan hexahelix.

Penelitian ini hanya bertujuan untuk merumuskan strategi percepatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban melalui sinergitas program dan kolaborasi multi stakeholder, sehingga akan lebih baik jika penelitian selanjutnya dapat memetakan hasil strategi implementasi kolaborasi program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban ke dalam nomenklatur program/kegiatan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban yang dapat dilakukan oleh Bappeda Litbang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Maipita, Mengukur kemiskinan & distribusi pendapatan, Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2014.
- [2] D. Alfisyahrin, "Optimalisasi Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Tkpkd) Dalam Perspektif Diskresi Kebijakan Penanganan Kemiskinan Kota Semarang," *Jurnal Media Administrasi*, vol. 3, no. 1, pp. 89-99, 2021.
- [3] M. Widaningsih and M. Puspita, "Penyusunan Grand Desain Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Garut," in *Seminar Nasional*

LAB-AP FISIP Untirta, Banten, 2017.

- [4] P. Laga and W. P. Primandhana, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan," in *Forum Ekonomi*, Surabaya, 2022.
- [5] Y. C. Pratama, "Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, vol. 4, no. 2, pp. 210-223, 2014.
- [6] T. Widayati, "Analisis Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Demak," *Media Ekonomi dan Manajemen*, vol. 28, no. 2, pp. 45-54, 2016.
- [7] A. Bakar, "Analisis Determinan Kemiskinan di Kabupaten Mimika," *Jurnal Kritis*, vol. III, no. 1, pp. 1-23, 2019.
- [8] A. Pangiuk, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Kemiskinan Di Provinsi Jambi Tahun 2009-2013," *Itizam Journal Of Shariah Economic Research*, vol. 2, no. 2, pp. 44-66, 2018.
- [9] E. Setjaningrum, N. C. Hidayat and S. Asmorowati, "Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember (Studi Kasus di Desa Tugusari Kabupaten Jember)," *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 19, no. 2, pp. 188-201, 2020.
- [10] E. S. Putri, "Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia," Analisis Pengaruh Inflasi, Pengangguran, dan Demokrasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia, Skripsi, 2017.
- [11] M. Fairuza, "Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan inklusif pada sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)," *Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 5, no. 3, pp. 1-13, 2017.
- [12] J. A. Ginting, D. Manongga and I. Sembiring, "The Spread Path of Hoax News in Social Media (Facebook) using Social Network Analysis (SNA)," in *International Seminar on Research of Information Technology and Intelligent Systems (ISRITI)*, 2018.
- [13] I. Yuliana, "Adopsi Social Network Analysis (Sna) Dalam Upaya Membangun Ketangguhan Bencana Di Masyarakat," *JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer)*, vol. 2, no. 2, pp. 49-54, 2019.
- [14] H. Tuhuteru and A. Iriani, "Analisis Kolaborasi Penelitian Ilmiah Dosen Fakultas X dengan Social Network Analysis (SNA)," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 4, no. 1, pp. 149-158, 2018.
- [15] S. E. Zaluchu, "Strategi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif di dalam Penelitian Agama," *Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, vol. 4, no. 1, pp. 28-38, 2020.
- [16] L. Sugiyono and M. D. Prasetyawati, "Determinasi Kemiskinan Penduduk Jawa Tengah 2013-2017," in *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019.
- [17] C. Sartika, M. Y. Balaka, W. A. Rumbia, M. Jurusan and U. Halu, "Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna," *Jurnal Ekonomi*, pp. 106-118, 2016.
- [18] R. Yunus and M. Radjab, Analisis Pengentasan Kemiskinan: Studi Kasus pada Program Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2018.
- [19] R. D. Lestari, "Analisis Pengaruh Amh, Jumlah Penduduk, Pengangguran, AHH, dan PDB Terhadap Kemiskinan Di Indonesia, Malaysia, Dan Thailand pada Tahun 2000-2020," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, vol. 10, no. 1, pp. 1-10, 2021.
- [20] Suryati and M. Syukri, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan," *Jurnal Varian*, vol. 3, no. 1, pp. 13-19, 2019.
- [21] M. Fairuza, "Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan inklusif pada sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi)," *Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 5, no. 3, pp. 1-13, 2017.
- [22] A. Sabaruddin, "Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik: teori, konsep dan aplikasi," 2015.
- [23] K. Silayar, "Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Kepulauan Sula," *Jurnal Renaissance*, vol. 6, no. 2, pp. 859-874, 2021.
- [24] D. Firmansyah, A. Suryana, A. Rifai , A. Suherman and D. P. Susetyo, "Hexa Helix: Kolaborasi Quadruple Helix Dan Quintuple Helix Innovation Sebagai Solusi Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19," *Ekuitas (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, vol. 6, no. 4, pp. 476-499, 2022.
- [25] S. Sasmian, S. Muchsin and A. Afiffuddin, "Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Tuban," *Jurnal Riset dan Konseptual*, vol. 9, no. 2, pp. 340-351, 2024.
- [26] D. H. Tsany, "Hasil Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Berbagai Program Pemerintah (Study Kasus Penanganan Kemiskinan di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Tahun 2020)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, pp. 1-10, 2020.
- [27] E. B. Santoso, Sutikno, V. K. Siswanto and Y. Setyaningsih , "Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1, pp. 113-129, 2023.